

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan kegiatan pelaku ekonomi yang menjalankan suatu usaha sesuai dengan bidang yang dikehendakinya dan dapat didirikan oleh perorangan maupun oleh badan usaha. Ada 3 bidang usaha di Indonesia yaitu usaha barang, jasa, dan manufaktur. Menurut Kementerian Perindustrian dalam Norkamsiah, dkk (2016), usaha barang adalah bidang usaha yang kegiatannya menjual produk berwujud kepada konsumen atau pembeli sehingga dari kegiatan ini terjadi adanya pemindahan kepemilikan produk tersebut dari penjual ke pembeli. Usaha jasa adalah bidang usaha dimana para pelaku usaha lebih menekankan pada pejualan produk yang tidak berwujud. Usaha manufaktur adalah bidang usaha yang kegiatannya mampu menciptakan suatu barang dan jasa yang bukan tergolong sebagai produk primer, dimana dalam kegiatannya tersebut mencakup selama proses awal sampai akhir menjadi suatu produk jadi siap dijual.

UMKM berperan penting bagi Indonesia. Selain memiliki kontribusi yang besar bagi PDB, UMKM menyerap lebih banyak tenaga kerja dibandingkan usaha skala besar. (Tambunan, 2009:59). Sesuai dengan data yang disajikan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Mikro Kecil dan Menengah UMKM memiliki peran serta terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia yang tercatat mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai 2017 sebesar 3.844.806 atau 3,41%. Tahun 2017 UMKM juga

berkontribusi dalam PDB Indonesia yang mengalami peningkatan sebesar 695.352,9 atau 9,92% dibandingkan dengan tahun 2016. ([www.depkop.go.id](http://www.depkop.go.id)).

Dalam menghadapi krisis ekonomi, UMKM terbukti lebih tangguh daripada perusahaan besar. Rohmad Hadiwijoyo, Ketua Dewan Direktur CIDES (*Center for Information and Development Studies*) menyebutkan tiga hal yang membuat UMKM lebih tahan menghadapi krisis ekonomi. (1) Produk UMKM lebih merakyat dan dibutuhkan setiap hari, (2) Lebih banyak sumber daya lokal (sumber daya manusia, bahan baku dan alat) yang terlibat dalam UMKM, (3) UMKM cenderung menggunakan pembiayaan yang bersumber dari pemiliknya sendiri tidak ditopang pinjaman dari bank ([Indonesia.Go.Id](http://Indonesia.Go.Id)).

Dilansir dari laman Kompasiana (01/01/2020), BPS melaporkan secara berturut-turut penyerapan tenaga kerja pada tahun 1997 pada perusahaan kecil, sedang dan besar mencapai 57.50 juta (87.62%), 7.7 juta (11.75%) dan 0.393 juta (0.61%) dan pada tahun 1998 menjadi 57.34 juta (88.66%), 6.9 juta (10.78%) dan 0.464 juta (0.56%).

Peran besar UMKM dalam membantu perekonomian Indonesia memang tidak diragukan lagi. Sebagai bentuk dukungannya, pemerintah menyediakan program pembinaan dan pelatihan untuk pelaku UMKM ([www.modalrakyat.id](http://www.modalrakyat.id)). Menurut Widyastuti (2017) pelaku UMKM seringkali terkendala dalam permodalan untuk mengembangkan usaha yang lebih maju agar mampu menjangkau pangsa pasar yang lebih luas demi meningkatkan penjualan produk mereka serta mampu terus bertahan di pangsa pasar. Salah satu upaya untuk memperoleh suntikan dana yaitu

dengan melakukan pengajuan kredit perbankan. Hingga saat ini banyak program pemerintah yang disediakan untuk mendukung permodalan sektor UMKM.

Sumber modal yang paling umum digunakan oleh UMKM adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang merupakan program pendanaan pemerintah bagi perseorangan, badan usaha dan kelompok usaha yang belum memiliki agunan tambahan serta memenuhi kriteria tertentu. Namun, dalam realisasinya program Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak sesuai dengan yang diharapkan para pelaku UMKM. Menurut Baas dan Schrooten (2006) dalam Widyastuti (2017), program KUR masih sulit diperoleh pelaku UMKM karena lembaga perbankan yang ditunjuk oleh pemerintah untuk penyaluran kredit usaha sangat berhati – hati. Mereka membutuhkan informasi yang jelas terkait kondisi UMKM khususnya mengenai informasi akuntansi yang memadai, namun pelaku UMKM belum mampu memberikan informasi akuntansi yang diminta oleh pihak perbankan. Hal ini seringkali menyebabkan pengajuan kredit yang dilakukan oleh pelaku UMKM sulit mendapatkan persetujuan atau bahkan ditolak.

Informasi akuntansi selain diperlukan sebagai syarat pengajuan kredit atau pendanaan, juga memiliki peranan penting lainnya diantaranya yaitu dapat memberikan pertimbangan untuk pengambilan keputusan yang strategis oleh manajemen atau pemilik perusahaan serta untuk mengetahui dan menganalisa perkembangan usaha secara detail. Menurut Zuhdi (2011), manajemen informasi akuntansi yang baik akan sangat berguna bagi usaha kecil untuk menentukan harga dan membuat berbagai keputusan.

Menurut Widyastuti (2017) pentingnya informasi akuntansi masih kurang disadari oleh para pelaku UMKM. Pencatatan atas laporan keuangan cenderung dilakukan secara sederhana sesuai dengan pemahaman mereka. Oleh sebab itu, hal ini menjadikan pelaku UMKM menetapkan suatu keputusan hanya berdasarkan perkiraan dan pemikirannya tanpa adanya bukti dasar yang kuat atas penetapan keputusan tersebut. Seringkali mereka belum mampu menerapkan standar akuntansi keuangan untuk menyusun laporan keuangan.

Suhairi (2004) dalam Kurniawansyah (2016) menyebutkan bahwa tingkat pendidikan yang rendah dan pengetahuan yang tidak komprehensif mengenai Standar Akuntansi Keuangan menjadi titik lemah UMKM. Lebih lanjut, Andrianto (2016) menyimpulkan bahwa pada umumnya, pelaku UMKM di Pasar Larangan – Sidoarjo tidak memahami fungsi informasi akuntansi dalam pengembangan usahanya. Selain itu, pelaku UMKM juga merasa kesulitan menerapkan pencatatan akuntansi sesuai dengan standar akuntansi karena terbatasnya pengetahuan mereka mengenai akuntansi. Hasil penelitian Sularsih dan Sobir (2019) mengungkapkan bahwa pelaku UMKM melakukan pembukuan dan pencatatan keuangan usaha secara sederhana hal ini terkendala kurangnya pemahaman dan keterampilan dalam membuat laporan keuangan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Dewan Standar Akuntansi Ikatan Akuntansi Indonesia membuat versi sederhana Standar Akuntansi untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK –ETAP) yakni Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan menengah (SAK – EMKM) pada 24 Oktober 2016.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti ingin melakukan penelitian di salah satu UMKM bidang produksi makanan yang ada di Kelurahan Kepatihan kota Ponorgo yaitu perusahaan jenang Teguh Raharjo dengan judul penelitian “Penerapan Pencatatan Keuangan Bagi Pelaku UMKM Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK – EMKM) pada Perusahaan Jenang Teguh Raharjo Ponorogo”

## **1.2 Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka hal – hal yang perlu diamati dari mayoritas pelaku UMKM hanya melakukan pencatatan keuangan secara sederhana seperti hanya melakukan pencatatan atas penjualan, pembelian, utang dan piutang yang dicatat atas berdasarkan pemahamannya sendiri sehingga seringkali tidak bisa memenuhi kepentingan pihak luar seperti lembaga perbankan apabila pelaku UMKM ingin melakukan pengajuan kredit perbankan. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini peneliti ingin menumbuhkan kesadaran akan pentingnya suatu laporan keuangan bagi pelaku UMKM sehingga diharapkan mereka melakukan pencatatan keuangan sesuai dengan standar akuntansi, sehingga dapat difokuskan masalah – masalah yang ingin diteliti dan dibahas dalam penelitian ini yaitu :

1. Sejauh mana pelaku UMKM yang menjadi subjek penelitian melakukan pencatatan keuangan serta kendala apa yang mereka hadapi.
2. Seberapa penting melakukan pencatatan keuangan dengan baik dan benar sesuai standar akuntansi bagi pelaku UMKM yang menjadi subjek penelitian.

### **1.3 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan :

1. Bagaimana pemahaman perusahaan jenang Teguh Raharjo terhadap pencatatan laporan keuangan sesuai dengan SAK – EMKM?
2. Bagaimana proses pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan Jenang Teguh Raharjo Ponorogo?
3. Bagaimana pelaporan keuangan perusahaan Jenang Teguh Raharjo Ponorogo?
4. Apa kendala yang dihadapi oleh perusahaan Jenang Teguh Raharjo Ponorogo dalam mencatat transaksi keuangan hingga penyusunan laporan keuangan?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan kajian permasalahan yang telah diuraikan di atas tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui proses penyusunan laporan keuangan pelaku UMKM.
2. Untuk mengetahui kendala – kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam penyajian laporan keuangan.
3. Untuk mengetahui pemahaman pelaku UMKM terhadap penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan SAK – EMKM.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diperoleh dalam melakukan penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Bagi UMKM

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi pelaku UMKM terkait SAK – EMKM serta diharapkan tumbuhnya kesadaran pelaku UMKM mengenai pentingnya pencatatan keuangan berdasarkan standar akuntansi.

## 2. Bagi Universitas

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan informasi serta dapat dijadikan tambahan referensi penelitian bagi peneliti selanjutnya khususnya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.

## 3. Bagi Penulis

Dapat menerapkan teori serta mengasah pengetahuan yang telah dipelajari selama masa perkuliahan di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur terkait SAK-EMKM.